

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Namun pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utamanya terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersama. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross national Product* (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan/kesenjangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro,2000:177).

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman antar daerah yang tinggi, di mana perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Wilayah-wilayah dengan potensi sumber daya alam dan lokasi yang menguntungkan, yang seharusnya berkembang dan menciptakan percepatan pembangunan bagi wilayah-wilayah yang tertinggal tidak hadir secara optimal. Pembangunan regional yang berimbang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal yang tercipta dari sinergitas interaksi antar wilayah juga tidak tercapai secara optimal (Anwar, 2005:56).

Pada skala nasional, tingkat kesejahteraan antar wilayah menjadi tidak berimbang dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi makro, dan sistem pemerintahan yang sentralistik yang cenderung mengabaikan terjadinya kesetaraan dan keadilan pembangunan antar-wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan (*hinterland*) mengalami eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Secara makro dapat dilihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya (Choirie, 2009:74).

Menurut Anwar (2005), kecenderungan pengembangan program-program kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejauh ini yang masih didominasi oleh strategi pengembangan dari sisi pasokan (*supply*) tanpa pengembangan strategi sisi permintaan yang cukup memadai. Strategi pembangunan wilayah harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan (*linkages*) antar wilayah. Strategi ini dapat

diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menunjang pembangunan sektor perekonomian dan juga dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis (saling memperkuat) antar wilayah.

Salah satu dampak persoalan ketimpangan wilayah adalah persoalan daerah tertinggal dan masalah ketimpangan pembangunan ini merupakan permasalahan disparitas wilayah yang membahayakan kesatuan nasional terutama pada pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Dari data Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005, dapat dilihat pada gambar 1.1 penyebaran daerah tertinggal dalam skala nasional.

**Gambar 1.1**

**Peta Jumlah Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal di Setiap Provinsi**



*Sumber : Kementerian Daerah Tertinggal, 2005*

Menurut Keputusan Menteri Daerah Tertinggal, nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005, daerah tertinggal ini didasarkan pada enam kriteria: (1) perekonomian masyarakat, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan lokal, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, (6) lokasi

kabupaten yang berada di daerah. Berdasarkan enam kriteria itu maka dapat terlihat sebagian besar provinsi yang mempunyai kabupaten daerah tertinggal terjadi di luar Jawa. Provinsi di ujung perbatasan Barat yaitu Nanggro Aceh (16) dan ujung Timur Papua (19) merupakan provinsi terbesar dengan kandungan daerah tertinggal, menyusul Kalimantan Barat di perbatasan utara (9). Tebaran daerah tertinggal memang banyak terlihat pada provinsi-provinsi yang belum tentu jauh dari pusat pusat kota nasional. Jawa, Bali merangkai kemajuan hingga Lombok dan ke Timur makin sulit, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Selatan mengandung banyak daerah tertinggal (15).

Provinsi Sulawesi Selatan (13) di mana kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan atau kolektor dan distributor Indonesia Timur, belum mampu menciptakan difusi kemajuan di wilayahnya. Sulawesi Selatan masih menyisakan banyak Kabupaten daerah tertinggal dengan jumlah yang besar yaitu 13 Kabupaten dari total 24 Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan diharapkan dapat mendorong perkembangan daerah-daerah di sekitarnya khususnya Kawasan Timur Indonesia (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2005).

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 (BPS Sulawesi Selatan 2012 : 8).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan,**  
**Tahun 2008-2012**

<b>TAHUN</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar Rp)</b>	<b>Pertum- buan (persen)</b>
2008	44.549,82	7.78
2009	47.326,08	6.23
2010	51.199,90	8,19
2011	55.098,74	7,61
2012	59.708,63	8,37
Rata-rata		7,64

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2012*

Selama periode 2008-2012, perekonomian Sulawesi Selatan relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 7,64 persen per tahun, lebih baik dibanding rata-rata sebelumnya yang mencapai 7,23 persen per tahun. Setelah krisis ekonomi tahun 1998, kinerja ekonomi Sulawesi Selatan terus membaik sejak tahun 2001. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat, hingga pada tahun 2008 tumbuh mencapai 7,78 persen, kemudian melambat pada tahun 2009 tumbuh 6,23 persen, dan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 2010 meningkat dengan tumbuh 8,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 tumbuh melambat 7,61 persen dan di tahun 2012 perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh meningkat cukup besar mencapai angka 8,37 persen atau tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan relatif selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pada tahun 2008 misalnya, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik yakni sekitar 7,78 persen sedangkan pada level

nasional hanya tumbuh sekitar 6,01 persen, dan pada tahun 2012 pertumbuhan Sulawesi Selatan meningkat lagi menjadi 8,37 persen sedangkan level nasional hanya tumbuh 6,23 persen (BPS Sulawesi Selatan 2012:9).

Pertumbuhan ekonomi ini bahkan terjadi ketika nilai ekspor Sulawesi Selatan justru turun. Penopang pertumbuhan ekonomi itu adalah sektor pertanian tanaman pangan yang menyumbang 39 persen dari total nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi 2008 berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi itu adalah sektor yang menampung lebih dari 51 persen tenaga kerja di Sulawesi Selatan (BPS Sulawesi Selatan 2012:9).

Berkembangnya perekonomian Sulawesi Selatan tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Setiap tahun PDRB per kapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan cukup besar. Dalam lima tahun terakhir misalnya, dari 10,82 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 19,46 juta rupiah pada tahun 2012 atau meningkat 1,8 kali lipat (BPS Sulawesi Selatan 2012:10).

Bila dibandingkan dengan PDB per kapita (Nasional), PDRB per kapita Sulawesi Selatan masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2008 misalnya, PDB Per kapita Nasional telah mencapai Rp 21.013.539,00 dan pada tahun 2012 telah mencapai angka sekitar Rp 33.338.987,00 (lihat tabel 1.2).

**Tabel 1.2**  
**PDRB Per kapita Sulawesi Selatan dan PDB Per kapita**  
**Indonesia, 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Per kapita Sulawesi Selatan (rupiah)</b>	<b>PDB Per kapita Indonesia (rupiah)</b>
2008	10.825.425	21.013.539
2009	12.567.364	23.647.682
2010	14.669.010	26.786.768
2011	16.929.022	30.424.352
2012	19.465.540	33.338.987

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2012.*

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi maka pada tahun 2012 angka PDRB per kapita Sulawesi Selatan adalah terbesar kedua setelah Sulawesi Utara yang mencapai Rp 20.344.832,00 (lihat tabel 1.3).

**Tabel 1.3**  
**PDRB dan PDRB Per kapita Provinsi di Sulawesi, 2012**

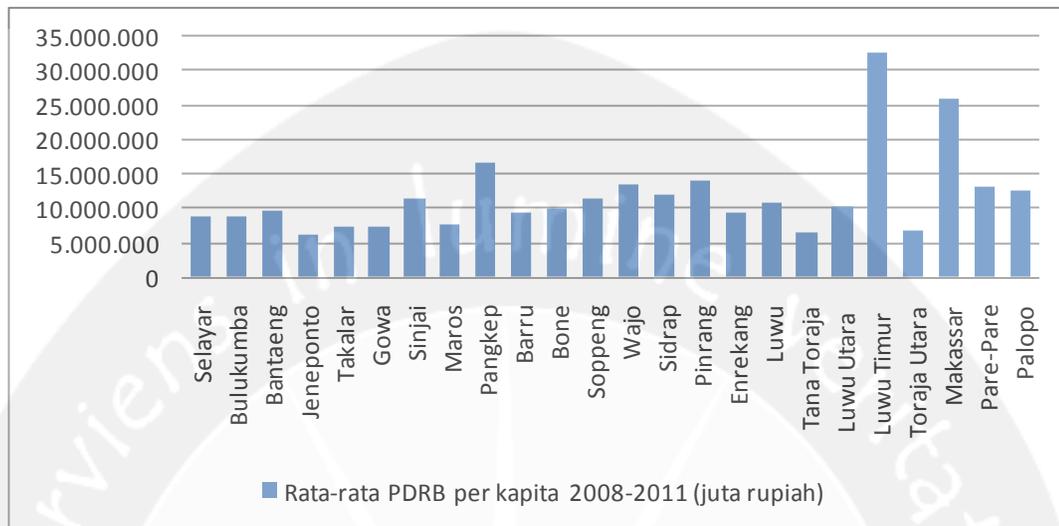
<b>Provinsi</b>	<b>PDRB atas dasar harga Berlaku (Juta rupiah)</b>	<b>PDB Per kapita (rupiah)</b>
Sulawesi Utara	47.198.303	20.344.832
Sulawesi Selatan	159.427.096	19.465.540
Sulawesi Tengah	51.062.073	18.709.353
Sulawesi Tenggara	36.600.745	15.785.709
Gorontalo	10.368.090	9.562.964
Sulawesi Barat	14.407.643	11.828.886

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2012.*

Apabila diamati dari besarnya PDRB per kapita Kabupaten/kota Sulawesi Selatan yang ditunjukkan oleh gambar 1.2, terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan. Tujuh wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah

Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Seperti terlihat pada diagram batang di bawah ini (BPS Sulawesi Selatan 2011:15).

**Gambar 1.2**  
**Rata-Rata PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2008 hingga 2011 (juta rupiah)**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.*

Perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang cukup signifikan ini dapat menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan sebagai akibat oleh tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu tidak dapat dihindari dan bahkan cenderung dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan di mana ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi yang wajar asalkan masih dalam batas yang layak. Sehingga perlu adanya identifikasi pemetaan ketimpangan pembangunan yang terjadi, untuk digunakan mengantisipasi

dan mensiasati ketimpangan yang terjadi dan terciptanya sinkronisasi perkembangan wilayah di Sulawesi Selatan.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi salah satu permasalahan yang serius di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengidentifikasi pemetaan ketimpangan, sangat diperlukan untuk menyusun strategi terciptanya sinkronisasi perkembangan wilayah di Sulawesi Selatan, sehingga diketahui:

- 1) Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011?
- 2) Bagaimana klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011?
- 3) Apakah ada kecenderungan terjadinya konvergensi ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah

- 1) Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011.
- 2) Mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011.
- 3) Menganalisis kecenderungan terjadinya konvergensi ekonomi antar Kabupaten/kota yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

- 1) Pengambil Kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini.
- 2) Ilmu Pengetahuan, secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi tinjauan pustaka berisi pengertian ketimpangan pembangunan ekonomi dan konsep mengenai ketimpangan ekonomi, dan studi/penelitian terkait.

### Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi metode penelitian berisikan tentang data, sumber data dan pengambilan sampel, metode analisis, tahapan penelitian dan defenisi operasional.

### Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian dengan menggunakan analisis ekonomi pembangunan.

### Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan implikasi kebijakan/saran dari hasil penelitian.

